MASALAH PNS PALING BANYAK DILAPORKAN

Kamis, 25 Januari 2018 - Razanah Balqis

MedanBisnis - Banda Aceh. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin mengungkapkan, pada periode tahun 2017 menerima sebanyak 203 laporan dugaan maladminstrasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dari 203 kasus yang dilaporkan itu, 129 telah diselesaikan dan 74 lagi masih dalam proses penyelesaian.

Taqwaddin mengatakan, untuk tahun ini kasus yang dilaporkan lebih banyak untuk kabupaten/kota, yaitu sebanyak 73 kasus. Selanjutnya Pemerintah Aceh sebanyak 36 kasus, BUMN/BUMD ada 16 kasus, yang lain hanya sekitar 3 sampai 8 kasus.

ï¿½Jadi kabupaten/kota yang paling dominan dilaporkan yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, ini mungkin karena kantor Ombudsman dekat dengan domisili masyarakat yang hendak melapor,ï¿½ kata Taqwaddin, di Banda Aceh, Selasa (2/1).

Dari data yang diperoleh, kasus yang banyak dilaporkan yaitu masalah kepegawaian 53 laporan, selanjutnya infrastruktur dan perhubungan 36 laporan, kesehatan 17 laporan, pendidikan 14 laporan, lingkungan hidup 11 laporan, dan lain-lain sektor.

Terkait dengan banyaknya masalah kepegawaian yang dilaporkan ke Ombudsman, Taqwaddin mengharapkan, agar para kepala daerah, khususnya para Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota agar menaruh perhatian serius terhadap masalah ini.

ï¿½Bagi Ombudsman, masalah kepegawaian adalah hal penting karena merekalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga, apabila masalah kepegawaian bisa diminimalisir maka pelayanan publik akan menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya dapat lebih mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat,ï¿½ ujarnya.

Dugaan maladminstrasi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah ketidakpatutan yang dilakukan oleh pelaksana layanan, selanjutnya tidak memberikan layanan dan penundaan berlarut.

Satu hal menggembirakan pada tahun 2017 ini adalah jumlah laporan terkait pungli menurun dratis dari tahun sebelumnya yang berada pada urutan ketiga. Sedangkan tahun 2017 ini laporan terkait pungli berada pada urutan keenam.

ï¿½Nah hal ini mungkin karena eksisnya Saber Pungli,ï¿½ ujar Taqwaddin.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat.

ï¿½Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah melaporkan kasus dugaan maladminstrasi kepada kami. Dan saya juga berharap kedepan agar masyarakat jangan sungkan atau ragu untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah,ï¿½ katanya.

Kepada aparat pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu menyarankan agar memberikan pelayanan publik yang maksimal, agar warga masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya.

ï¿½Insya Allah di tahun 2018 kami akan berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian laporan pengaduan masyarakat,ï¿½ ujar Taqwaddin.

Taqwaddin yang juga Ketua Pokja Pencegan pada Unit Pemberantasan Saber Pungli Provinsi Aceh mengatakan, selain optimalisasi penyelesaian laporan keluhan masyarakat, Ombudsman Aceh juga akan meningkatkan peran pengawasan dan pencegahannya agar pelayanan publik oleh pemerintahan di Aceh menjadi lebih bagus, baik pelayanan oleh Pemkab/Pemko, Pemprov, maupun oleh instansi vertikal dan BUMD/BUMN, sehingga masyarakat dan penduduk Aceh akan mendapatkan haknya atas pelayanan publik. (ht anwar ibr riwat)